



Hambatan Program Human Resources Development Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle dalam Mengurangi Kemiskinan di Aceh

Niky Muyasharah Miftah. By

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explain the obstacles of HRD program by IMT-GT in reducing the poverty in Aceh. Various effort had been made to reduce poverty in Aceh. One of them was the IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) as a sub-regional cooperation. However, through the HRD (Human Resources Development) program aims to reduce poverty and improve the quality of life, is not effective either. This research used qualitative methods, with neo-functionalism theory to prove the hypothesis. The result of this research found out that the ineffectiveness of IMT-GT HRD program was caused by the failure of IMT-GT to create good regional integration and the failure of HRD to work on spillover scheme.

Keywords: *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, Aceh, poverty, ineffectiveness, spillover*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle*) sebagai salah satu kerja sama sub-regional di bidang ekonomi yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Kerja sama ini berdiri sejak tahun 1993 hingga kini dan dibangun berdasarkan kesamaan tujuan untuk pengembangan posisi strategis pada wilayah sasaran negara anggota yang akan berpengaruh pada kemajuan integrasi ekonomi.

IMT-GT¹ secara umum bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat wilayah sasaran dengan beberapa program yang ditawarkan. Di antara programnya yakni HRD (*Human Resources Development*). Program ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada dengan menekankan

¹ Yakni 10 provinsi di pulau sumatera Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan), Malaysia (Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis dan Selangor) serta thailand (Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Hattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga, Phuket).

pada pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir sebagai faktor yang sangat mempengaruhi daya saing dan kompetisi nasional.

Pentingnya tujuan dari program HRD IMT-GT tentu sangat dibutuhkan bagi wilayah sasaran. Aceh sebagai salah satu wilayah sasaran yang ada Indonesia, merupakan provinsi dengan angka kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, pada tahun 2011, Aceh merupakan provinsi keempat termiskin di Indonesia. Selain itu, Badan Pusat Statistik Indonesia juga melaporkan, pada tahun 2011-2013 garis kemiskinan perdesaan di Aceh juga terus meningkat dan tertinggal jauh dengan tingkat kemiskinan nasional.

Pemerintah baik provinsi maupun pusat terus berusaha untuk mencari solusi dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Aceh. Di antaranya adalah, gencar mengundang investor untuk menanamkan modal di Aceh sehingga akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan serta mengentaskan keterbatasan ekonomi yang ada. Selain itu, beberapa program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan oleh pemerintah daerah seperti program *pro-poor* yang bekerja sama dengan UNICEF (*United Nations International Children's Fund*).

Usaha pemerintah ini tentu juga berhubungan erat dengan kehadiran IMT-GT, dimana kehadiran IMT-GT harusnya mampu menjadi salah satu pihak yang membantu dalam mengurangi kemiskinan di Aceh sesuai dengan tujuan dari IMT-GT dan program HRD itu sendiri. Ironisnya, baik IMT-GT maupun HRD itu sendiri justru mengalami inefektivitas. Hal ini dipertegas dengan laporan dari ILO (*International Labour Organization*) dan ADB (*Asian Development Bank*), bahwa IMT-GT hanya menunjukkan kemajuan yang sangat sedikit dalam perekonomian di wilayah-wilayah sasaran negara anggota atau dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pada penelitian ini yakni mengapa program *Human Resources Development* Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* tidak efektif mengurangi kemiskinan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan apa saja yang menjadi penyebab dari inefektivitasnya program HRD IMT-GT di Aceh, dengan membatasi jangkauan penelitian pada tahun 2007-2016 sebagai dua periode berjalannya kerja sama IMT-GT. Yakni, 2007-2011 dan 2012-2016.

Penelitian ini menggunakan teori neo-fungsionalisme dari Ernst B. Haas. Riedel (2008: 88-89) menjelaskan bahwa, teori ini hadir untuk menjelaskan tentang integrasi regional yang berkembang saat ini. Neo-fungsionalisme pada dasarnya berdiri untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar sebuah integrasi regional dapat berjalan dengan baik dan beriringan dengan faktor ekonomi dan politik yang ada untuk menciptakan tekanan pada masing-masing dimensi. Lebih lanjut, skema *spillover* menjadi salah satu unsur penting dalam neo-fungsionalisme demi membangun integrasi regional yang baik. Lindberg (dalam tulisan Malamud 2001: 3) menjelaskan bahwa, *spillover* merupakan proses mengambil tindakan tertentu terkait dengan tujuan tertentu, untuk menciptakan situasi dimana tujuan utama hanya akan tercapai jika ada tindakan lebih lanjut untuk mengiringi tujuan awal. Atau secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan lebih lanjut untuk menyempurnakan tindakan-tindakan sebelumnya. Hal ini dapat dipahami sebagai program, rancangan atau pembaharuan dalam sebuah regionalisme.

Neo-fungsionalisme sekaligus menjadi standar yang digunakan dalam tulisan ini, untuk mengetahui kebenaran akan asumsi bahwa integrasi regional yang baik akan tercapai melalui faktor-faktor yang dijabarkan oleh neo-fungsionalisme. Di antaranya: (1) peningkatan transaksi lintas batas, (2) lembaga supranasional serta (3) *spillover*. Pentingnya faktor *spillover* sebagai puncak dari standar keberhasilan neo-fungsionalisme, turut serta dibuktikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan terutama pada program HRD itu sendiri. Sehingga, akan muncul kesesuaian antara asumsi dasar teori dengan realita kasus program HRD IMT-GT.

Pembahasan

Fenomena Kemiskinan di Aceh

Faktor ekonomi masih menjadi instrument paling penting saat ini. *Department for International Development* menyatakan bahwa ekonomi dianggap paling mampu untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup negara-negara berkembang, karena erat kaitannya dengan kesejahteraan, kesempatan kerja serta dapat membuka wawasan untuk mengenyam pendidikan. Di samping itu, Majid (2014: 20) menambahkan bahwa, pendidikan juga menjadi instrumen penting lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan mengembangkan sumber daya manusia sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan suatu negara.

Menyadari hal tersebut, Aceh terus berusaha untuk memperbaiki perekonomiannya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya, memanfaatkan dan gencar terhadap investasi swasta serta melaksanakan kerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta demi menanggulangi kemiskinan di Aceh.

Meski begitu, tingkat kemiskinan di Aceh masih tergolong tinggi. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh masih jauh di atas angka rata-rata nasional. Hal ini salah satunya terbukti dengan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka (TPT)² di Aceh yang meningkat pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2011 sebesar 7,43%, tahun 2012 meningkat menjadi 7,88%, 2013 meningkat kembali menjadi 9,1%. Selain itu, BAPPEDA juga merincikan beberapa faktor penyebab kemiskinan yang ada di Aceh: (1) sebaran penduduk miskin lebih banyak di pedesaan dibandingkan dengan kota, (2) besarnya gap garis kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta (3) peningkatan terhadap jumlah peserta didik justru menggambarkan kecenderungan mobilitas penduduk menuju daerah lain yang dianggap memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik.

Pentingnya faktor ekonomi bagi pengembangan wilayah Aceh itu sendiri menjadi permasalahan serius yang perlu untuk diperhatikan. Ketidakmerataan ekonomi serta ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat Aceh itu sendiri. Sehingga, perlu adanya kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan demi meminimalisir hal tersebut di atas.

² Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

Inefektivitas program HRD IMT-GT

Kehadiran IMT-GT beserta program HRD yang diharapkan dapat memberikan perubahan bagi wilayah sasaran negara anggota melalui fungsi dan tujuan berdirinya justru mengalami inefektivitas. Sebagai salah satu wilayah sasaran IMT-GT, Aceh justru tidak pernah merasakan kehadiran dari program HRD. Uninet (*University Network*)³ merupakan satu-satunya program HRD yang ada di Aceh, namun tidak ada satupun program Uninet yang sedang dan telah berjalan di Aceh. Padahal, berdasarkan presentasi Indonesia pada The 6th IMT-GT WGHRD tahun 2016 menjabarkan enam program Uninet yang akan dijalankan di wilayah sasaran. Di antaranya (1) *Scholarship Joint Program*, (2) *Student and Staff Mobility*, (3) *Plant Tissue Culture Project*, (4) *Energy Saving and Green Building Project*, (5) *Green Curriculum* serta (6) *Training Center*.

Selain itu, di antara inefektivitas program HRD IMT-GT adalah, adanya tumpang tindih antara satu program dengan program lainnya. Hal ini terlihat pada inkonsisten HRD dalam menjalankan programnya. Pada tahun 2007 program *The Three in One (3 in 1) Policy* dinyatakan masih dalam rencana, namun pada tahun 2008 HRD justru mengajukan proyek baru yakni terkait seminar untuk mempromosikan partisipasi wanita dalam pasar kerja dan juga masih dalam bentuk rencana. Di sisi lain, pada *The IMT-GT Roadmap 2007-2011 Action Plan: Status and Updates* menjabarkan bahwa beberapa proyek HRD hanya berada pada status yang cenderung tidak berkembang. Pada program akreditasi dan program pelatihan dan Uninet masih dalam status akan berjalan. Sedangkan, program *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dan fasilitasi mobilitas pekerja melalui pelatihan tenaga ahli di wilayah sasaran IMT-GT masih berstatus direncanakan.

Kendala IMT-GT dalam Membentuk Integrasi Regional yang Baik

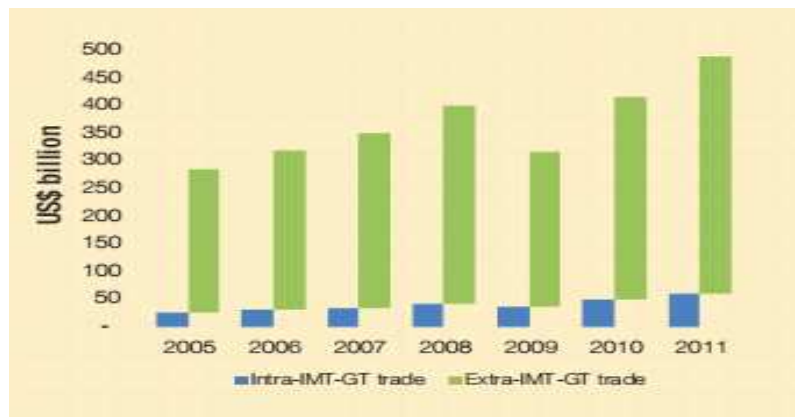
Menurut Lombaerde dkk (2006: 2-7), integrasi regional dapat direfleksikan sebagai proses antar negara yang mengadopsi skema pendekatan unidimensional atau multidimensional yang secara sederhana lebih dikenal dengan kerja sama. Lebih lanjut, IMT-GT itu sendiri masuk dalam kerja sama berbentuk multidimensional karena organisasi yang berdiri berdasarkan letak geografis, dan termasuk di dalamnya kerja sama berbentuk *Growth Triangle* (GT).

Sebagai sebuah kerja sama sub-regional, neo-fungsionalisme memberikan sugesti berdasarkan pandangannya dalam menciptakan integrasi regional yang baik. berdasarkan tulisan Alec Stone Sweet (Sweet 2012: 9-11), ada tiga hal yang menjadi poin terciptanya integrasi menurut pandangan teori neo-fungsionalisme: (1) meningkatkan transaksi lintas batas, (2) tata kelola/pemerintahan transnasional yang berfungsi sebagai lembaga untuk membuat peraturan serta menyelesaikan masalah yang ada, (3) hasil dari transaksi lintas batas menghasilkan *spillover* sebagai mekanisme dasar sebuah integrasi terbentuk. Ketiga faktor ini akan di ulas untuk mengetahui apakah premis neo-fungsionalisme terkait integrasi yang baik telah berjalan pada kerja sama IMT-GT.

³ Uninet merupakan program yang dibawah oleh IMT-GT. Berdiri sejak tahun 1996 dengan beranggotakan Sembilan universitas dari negara anggota, diantaranya: Universitas Syiah Kuala, Universitas Suamtera Utara, Universitas Andalas dan Universitas Riau (Indonesia). Universiti Teknologi MARA, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Sains Malaysia (Malaysia). Prince of Songkla University dan Thaksin Univerisity (Thailand).

Pertama, menurut Sweet integrasi yang baik akan tercipta jika adanya peningkatan dalam transaksi lintas batas. Namun, berdasarkan laporan dari IMT-GT *statistical information brief* tahun 2013 menggambarkan ketimpangan transaksi perdagangan antara intra dan ekstra IMT-GT:

Grafik 1
Tren Perdagangan Intra dan Ekstra IMT-GT Tahun 2005-2011



Sumber: IMT-GT *Statistical Information Brief* Tahun 2013

Melalui grafik di atas dapat dijelaskan bahwa meski mengalami peningkatan pada transaksi perdagangan, baik intra maupun ekstra IMT-GT. Namun, hal ini justru membuktikan terdapat ketimpangan yang jauh antara transaksi intra dan ekstra IMT-GT, dimana transaksi intra jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan ekstra IMT-GT.

Kedua, secara institusi, IMT-GT tidak memiliki supremasi/lembaga hukum tertinggi yang berbentuk supranasional untuk membuat aturan atau menyelesaikan permasalahan. Padahal, menurut neo-fungsionalisme hal ini dibutuhkan demi menjamin pelaksanaan program dan menaungi permasalahan atau isu di dalam organisasi itu sendiri. Kehadiran lembaga ini juga sekaligus untuk menciptakan dan meningkatkan interaksi antar negara anggota. Struktur organisasi pada IMT-GT justru bersifat *intergovernmentalism*⁴. Hal ini dapat dilihat pada laman resmi IMT-GT⁵ yang menjelaskan tentang *institutional mechanism*, dimana hanya terdiri *ministerial meeting*, *senior officials meeting*, *working group meeting* serta *chief ministers and governors forum*. Struktur organisasi IMT-GT tersebut menggambarkan bahwa tidak ada lembaga yang berbentuk supranasional untuk membawahi negara anggota sebagai pembuat aturan atau pihak yang dapat menyelesaikan masalah.

Ketiga, menurut Sweet, jika kedua faktor di atas telah dijalankan maka *spillover* secara otomatis akan terbentuk. Rosamond (2005: 10-11) menjelaskan *spillover* sendiri adalah proses perluasan sektor untuk mendukung proses integrasi yang ada dengan mengikutsertakan peran negara didalamnya. *Spillover* sendiri juga nantinya akan menghasilkan interdependensi positif antar negara anggota yang saling menguntungkan.

⁴ *Intergovernmentalism* adalah kerja sama yang melibatkan negara anggota dalam pembuatan prosedur kebijakan, sehingga negara memiliki kontrol atasnya dan tidak merusak kedaulatan secara langsung (Allerkmap 2009: 1-3).

⁵ Struktur organisasi IMT-GT dapat dilihat langsung pada laman resmi IMT-GT (www.imt-gt.org) pada bidang *institutional mechanism*

Karena pada dasarnya kedua hal yakni peningkatan transaksi lintas batas dan pembentukan lembaga supranasional juga secara otomatis membentuk interdependensi positif antar negara anggota yang menjadi pen jembatan menuju terbentuknya *spillover*.

Kegagalan HRD dalam menciptakan spillover

Kegagalan *spillover* perlu dibuktikan bahwa tidak hanya disebabkan kegagalan dua faktor sebelumnya, namun juga disebabkan internal program HRD itu sendiri. Berdasarkan analisa yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala terciptanya skema *spillover* dalam program HRD IMT-GT, yakni: (1) sulitnya penyamaan standar disebabkan diskusi yang lamban, (2) kecenderungan penyamaan program dengan RPJMN serta (3) kegagalan berjalannya program Uninet di Aceh. Kendala-kendala tersebut membuktikan bahwa kegagalan *spillover* bukan hanya karena gagalnya menjalankan dua faktor yang dijelaskan oleh neo-fungsionalisme, melainkan juga didukung dengan faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan terciptanya skema *spillover*.

Pertama, berdasarkan laporan dari IMT-GT WGHRD tahun 2016. Negara anggota berusaha untuk melakukan penyamaan standar dalam pembangunan akreditasi di bidang pariwisata, konstruksi, industri makanan dan perkapalan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas program berdasarkan standar di kawasan IMT-GT. Selain itu, berdasarkan *Record of Discussion Meeting IMT-GT*, standar yang dimaksud adalah dimana masing-masing negara anggota memberikan standar kemampuan tertentu pada bidang keahlian yang ada, sehingga menghasilkan kualifikasi yang bisa diajukan sebagai pengakuan di negara anggota.

Standar yang ingin dicapai tersebut nyatanya tidak terealisasi karena terbentur oleh diskusi yang belum menemukan titik temu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Puty Retnowulan sebagai Kepala Sub-bagian Kerja sama Non-ASEAN bidang HRD IMT-GT⁶ menyatakan bahwa, selama ini belum ada program nyata yang benar-benar dijalankan di Aceh. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sulitnya penyamaan standar antar negara anggota, sehingga terkesan hanya berjalan di tempat. Keadaan tersebut juga dibuktikan pada rencana proyek HRD IMT-GT tahun 2016, dimana pada proyek *NET Programming for IT Software Solution* pada 30 Juli 2015 tidak mendapatkan respon, begitu pula dengan program *Information Network Cabling* yang juga tidak ada respon lebih lanjut dari negara anggota.

Kedua, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna Keumala sebagai Koordinator Kerja sama IMT-GT Badan Investasi dan Promosi Aceh, bahwa adanya kecenderungan penyamaan program HRD dengan RPJMN yang bertujuan agar Provinsi mendapatkan anggaran dana yang jelas. Hal ini dibuktikan bahwa, tidak berjalannya program HRD disebabkan karena tidak adanya tujuan dari program HRD yang sesuai dengan program prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa tujuan dari program HRD adalah mengurangi kemiskinan dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, melalui program-program seperti pelatihan, pendidikan dan pengembangan karir.

⁶ Wawancara dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 9 Januari 2016 pukul 09.30 WI

Sedangkan pada program prioritas RPJMN tahun 2010-2014⁷ dalam penanggulangan kemiskinan tidak ada satupun program yang sesuai dengan tujuan dan rencana program HRD.

Dapat dibandingkan dengan salah satu program Unicef yang bekerja sama dengan Bappeda, yakni program *pro-poor* Aceh yang sukses dilaksanakan pada tahun 2007-2011 yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, juga tertera pada RPJMN. Ini membuktikan bahwa faktor elit politik sangat mempengaruhi berjalannya program yang ada. Malamud menjelaskan (2001: 15-19) bahwa, dalam *spillover* dibutuhkan adanya dorongan atau penyokong dari elit politik sebagai pemilik kekuasaan untuk menyeimbangkan saling ketergantungan akan ekonomi. Atau keadaan dimana faktor politik dan faktor ekonomi harusnya dapat berjalan beriringan agar menciptakan skema *spillover* yang baik.

Ketiga, sebagai satu-satunya program HRD yang berjalan di Aceh, Uninet juga gagal dalam melaksanakan tugasnya. Meski program Uninet telah disepakati untuk dijalankan di Aceh, namun tidak ada satupun proyek dari Uninet itu sendiri yang telah berjalan di Aceh. Pada presentasi Indonesia dalam The 6th Working Group Meeting on Human Resources Development Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Tahun 2016 menjelaskan beberapa proyek Uninet yang akan dijalankan di Banda Aceh, diantaranya: *Joint Conferences, Scholarship Joint Program, Student and Staff Mobility, Plant Tissue Culture Project and Energy Saving* serta *Green Building Project*. Namun, seluruh program tersebut belum berjalan dan masih sebatas rencana yang akan dilakukan pada periode mendatang, yakni 2017-2021.

Selain itu, program Uninet sendiri dinilai tidak tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan fungsi awal dari HRD IMT-GT. Berdasarkan proyek-proyek Uninet yang dijabarkan, Uninet hanya bertujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan mahasiswa dan akademisi, padahal tujuan dari HRD adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan mensejahterakan dan mengembangkan sumber daya manusia di wilayah sasaran negara anggota. Tidak tepat sasarannya IMT-GT juga dapat ditinjau dari keadaan masyarakat Aceh dimana memiliki angka kemiskinan yang tinggi dan angka pendidikan yang rendah. Hal ini membuktikan ketidaksesuaian proyek Uninet dengan tujuan dari HRD dan keadaan lapangan yang terjadi di Aceh.

Kegagalan HRD dalam menjalankan *spillover* dibuktikan dengan adanya kendala-kendala internal HRD itu sendiri. Keadaan ini membuktikan bahwa gagalnya pembentukan skema *spillover* bukan hanya karena proyeksi yang dijelaskan oleh neo-fungsionalisme, melainkan juga adanya hambatan lain dari HRD itu sendiri yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan perluasan program dan menciptakan interdependensi positif yang menguntungkan.

Penutup

Kehadiran IMT-GT melalui program HRD nyatanya tidak memberikan penyelesaian masalah pada tingginya angka kemiskinan di Aceh. Padahal, sesuai dengan tujuan dan fungsi dari IMT-GT dan HRD yakni mengurangi kemiskinan dengan

⁷ Program prioritas RPJMN tahun 2010-2014 dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada Buku Resmi RPJMN Tahun 2010-2014 (Bab II).

mensejahterakan sumber daya manusia yang ada harusnya mampu menjadi pen jembatan untuk menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan kemiskinan di Aceh. IMT-GT dan program HRD itu sendiri justru mengalami inefektivitas yang menyebabkan terhambatnya program-program yang di usung.

Penggunaan teori neo-fungsionalisme dan skema *spillover* untuk menjelaskan mengenai hambatan yang terjadi pada program HRD IMT-GT dalam mengurangi kemiskinan di Aceh terbukti. Neo-fungsionalisme menjelaskan agar sebuah regionalisme dapat berjalan dengan baik maka diperlukan tiga faktor yang perlu dijelaskan oleh regionalisme itu sendiri, yakni: (1) meningkatkan transaksi lintas batas, (2) tata kelola/pemerintahan transnasional yang berfungsi sebagai lembaga untuk membuat peraturan serta menyelesaikan masalah yang ada, (3) hasil dari transaksi lintas batas menghasilkan *spillover* sebagai mekanisme dasar sebuah integrasi terbentuk. Ironisnya, tidak ada satupun dari sugesti neo-fungsionalisme yang berjalan pada IMT-GT. Kegagalan ini, terutama dalam pembentukan skema *spillover* juga dibuktikan dengan faktor lain dari internal HRD itu sendiri, yakni: (1) sulitnya penyamaan standar disebabkan diskusi yang lamban, (2) kecenderungan penyamaan program dengan RPJMN serta (3) kegagalan berjalannya program Uninet di Aceh. Hal ini menjadi kendala bagi HRD dalam melakukan perluasan program dan menciptakan interdependensi positif antar negara anggota.

Referensi

- BAPPEDA Aceh dan UNICEF Indonesia. n.d. "Pemetaan Kebijakan Pro Rakyat Miskin di Provinsi Aceh 2007-2011".
- Departemen for International Development. n.d. "Growth: Building Jobs and Prosperity in Developing Countries"
- IMT-GT WGHDRD. 2012. "Record of Discussion of The 4th Meeting IMT-GT Working Group Meeting on Human Resources Development"
- IMT-GT. 2016. "Record of Discussion The 6th IMT-GT Working Group Meeting on Human Resources Development"
- International Labour Organization and Asian Development Bank. 2014. "ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity".
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2011. "Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II"
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. "Buku I Prioritas Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Lombaerde, De Philippe *et.al* (eds), 2006. "System of Indicators for Monitoring Regional Integration Processes: Where do We Stand?," konferensi disampaikan pada *session 4 Implementtaion Issues Third CEPH-IDB Conference New Regionalism: Progress, Setbacks and Challenges*, Washington DC, 9-10 Februari 2016
- Malamud, Andres. 2001. "Spillover in European and South American Integration. An Assessment," disampaikan pada pertemuan Latin American Studies Association 2001, Washington D.C, 6-8 September 2001
- Riedel, Rafat. 2008. "'Spillover' in Action- NeoFunctionalism Revisited. Freedom to Provide Services Outside the Country of Establishment and its Consequences," *Polish Political Science*, Vol XXXVII 2008, PL ISSN 0208-7375, pp. 86-105.
- Rosamond, Ben. 2005. "The Uniting of Europe and the foundation of EU Studies: Revisiting the Neofunctionalism of Ernst B. Haas," *Journal of European Public Policy*, Vol. 12, No.2, pp: 237-254

- Schneider, J. Christina. 2017. "The Political Economy of Regional Integration," *Annual Review of Political Science*, Vol. 20, pp. 229-248.
- Sweet, Stone Alec. 2012. "Neofunctionalism and Supranational Governance," *Yale Law School Faculty Scholarship Series*, Paper 4628, pp. 1-40
- WGHRD Indonesia. 2016. "Indonesian Porposal," presentasi disampaikan pada *The 6th IMT-GT Working Group Meeting on Human Resources Development*, Jakarta, Indonesia, 4-6 September 2016